

## **BAB II**

### **HUBUNGAN ANTARA AUSTRALIA DENGAN FIJI**

Pada pembahasan ini memaparkan mengenai bagaimana berlangsungnya kudeta militer di tahun 2006 di Fiji, dengan timbulnya kudeta militer Fiji ini mempengaruhi dinamika keamanan di wilayah Pasifik Selatan. Dalam bab ini menerangkan terkait posisi dari dalam negeri Fiji sebagai sebuah negara yang dapat memberikan pengaruh besar di kawasan.

Penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang Fiji yang menjadi salah satunya negara bagian dari wilayah Pasifik Selatan. Fiji kerap kali menghadapi kudeta dan terakhir terjadi di tahun 2006 yang mengundang perhatian dari negara besar pada kawasan yakni Australia. Adanya persoalan domestik Fiji sebelum kudeta militer pada tahun 2006 berlangsung serta seperti apa kronologi kudeta ini bisa timbul.

#### **2.1 Sejarah Kudeta Fiji**

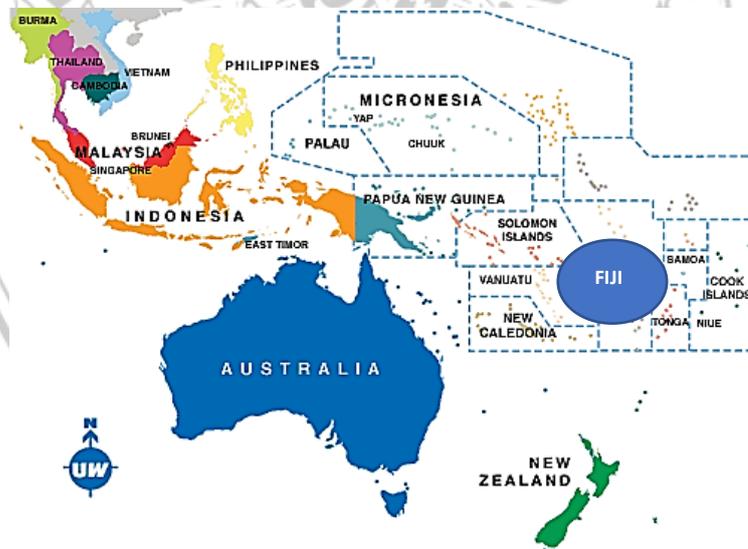
##### **2.1.1 Latar Belakang Kudeta Fiji Tahun 2006**

Fiji adalah negara dengan posisi geografis berada pada Pasifik Selatan, yang mempunyai pulau lebih dari 300, namun hanya sedikit yang dihuni yakni satu sampai tiga pulau. Fiji negara dengan luas wilayahnya mencapai 18.333 km<sup>2</sup> dan terdapat pulau besar yakni Vanualevu dan Viti Levu, negara Fiji ini ada di

tengah-tengah 15° dan 22° garis lintang selatan, berada di 177° garis lintang barat serta 178° garis lintang timur pada bagian selatan Samudera Pasifik.<sup>25</sup>

Cara kepemilikan tanah di negara Fiji yakni dengan diturunkannya tanah dari era kolonial saat pembagian antara pengusaha kulit putih dengan rakyat pribumi Fiji. Pemerintah tanah dari seluruh area mencapai 172.606 hektar terdiri dari 9,46% yang diatur departemen pertanahan. Tanah merupakan barang yang berharga yang dimiliki (149.085 hektar) dari 8,17%. Pada tahun 1874 sebelum Fiji diserahkan ke Inggris tanah disana dihuni oleh kebanyakan orang Eropa semenjak awal terseleksi yang dimusyawaratkan oleh imigran penghuni tetap. Dengan sisa 1.503.662 hektar atau 82,37% yang dimiliki masyarakat komunal atau ketunggalan masyarakat yang dikenal devisi utama desa atau Mataqali sebanyak 5.280.<sup>26</sup>

**Gambar 2. 1 Peta Wilayah Pasifik Selatan dan Letak Geografis Fiji<sup>27</sup>**



<sup>25</sup> Ilaitia S. Tuwere, 2007, *Land: A Fijian Perspective*, Dalam *Majalah Concilium (Inggris)*, *Conc (I)*, London: SCM Press, hal. 79.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Peta wilayah Pasifik Selatan dan letak geografis Fiji, diakses dalam <https://1.bp.blogspot.com/-FwLEWImX8-I/Wg3NPu3Z5rI/AAAAAAAAAQw/h7KG3Gb2wcQyEewPik0NLDRmk050J3jwOCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/letak%2Bgeografis%2BIndonesia.jpg> (10/9/2023, 13:34 WIB)

Fiji mengalami kudeta sebanyak 4 kali selama dua dekade terakhir. Tiga diantaranya diakibatkan oleh ketegangan antara Fiji India dengan etnis Fiji. Permasalahan yang menjadi histori berlangsungnya kudeta pada awal kemerdekaan di Fiji permasalahan terpenting yakni agama, dimana penduduk Fiji menganut ras pribumi yakni Melanesia dengan Gereja Methodis, akan tetapi ras India atau ras pendatang menganut agama Hindu. Permasalahan mengenai ras ini menjadi penyebab terjadinya konflik di Fiji yang tidak dapat dilupakan. Jika dilihat dari kudeta yang terjadi bahwa pihak satu menginginkan persamaan atas hak India Fiji sedangkan yang satunya menginginkan adanya pengurangan hak atas India Fiji. Akibat yang dihasilkan dalam kudeta tahun 1987 yakni terhadap konstitusi yang memastikan etnis India Fiji dan diperbolehkan untuk menduduki posisi setengah kursi dalam parlemen serta menahan memangku sebagai Perdana Menteri etnis India.<sup>28</sup>

Di tahun 2000 kudeta oleh George Speight yang berujung pada dilengserkannya Mahendra Chaudry yakni Perdana Menteri Fiji. Didukungnya oleh Gereja Methodis dalam proses kudeta yang memiliki tujuan membuat negara Fiji menjadi theokrasi Krisen. Dimana situasi tersebut mengakibatkan serta membuat pemimpin kudeta pada desember tahun 2006 Josia Voreqe Frank Bainimarama, mengalami perselisihan dengan Gereja Methodis.<sup>29</sup>

Agresi dalam demokrasi timbul di Fiji yakni melalui adanya pembubaran konstitusi yakni kudeta militer terhadap Perdana Menteri oleh Frank Bainimarama

---

<sup>28</sup> "Background to Fiji's four coups", diakses dalam [BBC NEWS | Asia-Pacific | Background to Fiji's four coups](#) (10/9/2023, 15:05 WIB)

<sup>29</sup> *Fiji, Government and Society*, diakses dalam [Fiji - Multiculturalism, Parliamentary Democracy, Melanesian | Britannica](#) (12/9/2023, 15:57 WIB)

yakni pimpinan militer Fiji. Kudeta Militer merupakan sebuah rezim dengan menjalankan kekuasaan atas landasan kelembagaan yang dilakukan oleh militer, dimana para pemimpin militer memerintah yakni menjadi suatu junta dengan mengganti pemerintahan di antara jenderal terpenting.<sup>30</sup>

### **2.1.2 Kronologi Kudeta Fiji Tahun 2006**

Kudeta yang timbul di Fiji yang ketiga kalinya selama kurun waktu 20 tahun. Diumumkan dengan pengambil alihan kekuasaan oleh Frank Bainimarama di Fiji. Frank Bainimarama sebagai Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Fiji, setelah menggulingkan pemerintahan yang demokratis kemudian mengambil alihan kekuasaan pemerintah dengan berbagai pertimbangan bahwa dilakukannya korupsi oleh pemerintah serta menggertak akan melaksanakan kudeta. Kelompok bersenjata nasionalis pribumi menyerang Parlemen Fiji serta menjadi orang India pertama yang menyandera Perdana Menteri Mahendra Chaudhry, dengan sebagian anggota parlemen disandera sebelum memberikan kekuasaan terhadap pemerintah sementara.

Kudeta 2006 akhirnya memicu reaksi dari dunia luar, salah satunya Australia. Hal ini karena kudeta tahun 2006 secara luas dipandang sebagai pelanggaran nilai demokrasi, karena kudeta tahun 2006, militer bukan hanya senang menumbangkan pemerintah semacam sebelumnya, kudeta tahun 2006 dipandang menjadi usaha oleh militer Fiji untuk mencoba pengambilalihan pemerintahan serta memerintah pemerintahan di bawah kekuasaan militer yang diketuai Frank Bainimarama. Tidak berhenti di situ, Frank Bainimarama

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 143.

dipandang dibutakan oleh kewenangan, karena Bainimarama pun menggagalkan parlemen serta semua sistem pemerintahan yang berfungsi. Dalam hal ini sebabnya mengapa kudeta tahun 2006 menuai kritik serta reaksi buruk oleh dunia internasional, terutama Australia.

Presiden Fiji, Ratu Joseph Iloilo, menggagalkan parlemen, sehingga memberi jalan untuk kudeta militer. Australia serta Selandia Baru mengutuk perebutan kedaulatan oleh militer. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menyatakan reaksi keras dalam hadapan Parlemen di Canberra, dengan mengatakan bahwa tindakan militer ke-29 mampu berpengaruh negatif dalam perekonomian di Fiji.<sup>31</sup>

Perdana menteri Fiji yang sekarang digulingkan juga memohon pemerintah Australia guna campur tangan secara militer. Tetapi Australia menampik permohonan tersebut.<sup>32</sup> Pemerintah sementara setelah kudeta di tahun 2007 alhasil membangun Komisi Nasional untuk Fiji yang Lebih Baik yang bertugas menyusun Piagam Rakyat.<sup>33</sup> Piagam tersebut berusaha dalam membentuk kehidupan yang koheren bagi seluruh bagian bangsa Fiji. Terdapat beragam ras, terutama penduduk asli Fiji serta turunan India. Dimana dengan pembuatan piagam diharapkan dapat menjadikan inisiatif dalam membangun Fiji.

---

<sup>31</sup> DW, *Kudeta militer Fiji*, di akses dalam <https://www.dw.com/id/kudeta-militer-di-fiji/a-2956694> (19/9/2023, 23:47 WIB)

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Loc. Cit.* Fiji, Government and Society.

## **2.2 Dampak Kudeta Terhadap Hubungan Australia dan Fiji**

Kudeta militer tahun 2006 di Fiji menandai perubahan signifikan dalam hubungan antara Fiji dan Australia. Sebelum kudeta, kedua negara menikmati hubungan yang relatif stabil dan saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk diplomasi, ekonomi, dan dukungan militer. Namun, pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Fiji dan respons Australia terhadap peristiwa ini memicu banyak perubahan besar dan kompleks dalam dinamika bilateral mereka.

Dampak adanya kudeta di Fiji sendiri yaitu, ketika pergantian rezim dengan paksa, Fiji menghadapi kemunduran ekonomi yang memicu kelabilan pada negaranya. Akibat atas kudeta militer, dukungan keamanan serta sokongan dari Australia, Selandia Baru, Perancis serta Amerika Serikat menjadi terhenti. Lenyapnya kerja sama pertahanan bersama sahabat utamanya ini menyurutkan keunggulan Fiji dalam menangani isu kejahatan lintas negara serta mempertahankan perbatasannya.

Kudeta militer tahun 2006 di Fiji menyebabkan ketidakstabilan politik berkepanjangan, dengan pemerintahan demokratis digantikan oleh rezim militer di bawah Komodor Frank Bainimarama. Pemilu dan proses demokrasi ditunda, dan konstitusi diubah secara signifikan. Sanksi ekonomi oleh Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, serta Uni Eropa mengakibatkan penurunan bantuan luar negeri dan investasi. Pariwisata, sebagai sumber pendapatan utama, merosot karena penurunan jumlah wisatawan, dan tingkat pengangguran meningkat akibat penurunan aktivitas ekonomi. Fiji mengalami isolasi diplomatik dari negara-negara Barat dan organisasi internasional seperti Persemakmuran dan Forum

Kepulauan Pasifik, yang mengecam kudeta dan memberlakukan sanksi. Keanggotaan Fiji di beberapa organisasi internasional dibekukan, mempengaruhi partisipasi negara tersebut dalam forum regional dan global.

Rezim militer memberlakukan pembatasan kebebasan berbicara dan pers, dengan sensor dan intimidasi terhadap media yang kritis. Adanya laporan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum terhadap oposisi politik dan aktivis. Ketegangan etnis antara penduduk asli Fiji dan etnis India meningkat, meskipun ada upaya pemerintah militer untuk memperbaiki hubungan etnis. Ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan dan militer meningkat di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, kudeta militer 2006 membawa dampak luas, termasuk ketidakstabilan politik dan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan isolasi internasional yang dirasakan oleh masyarakat Fiji.

Semenjak kudeta ini, Australia memandang Fiji sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya, yang kemudian Australia menggagas keikutsertaan yang kian intensif dengan kawasan Melanesia. Pengucilan Australia dari Fiji memperburuk hubungan regional dengan Papua Nugini, Solomon serta Vanuatu. Hilangnya kerja sama diantara Australia dan negara ini memberi peluang bagi Tiongkok guna masuk serta mengembangkan hubungan bersama negara-negara kepulauan ini.<sup>34</sup> Kudeta militer di Fiji tahun 2006 mempunyai berbagai implikasi terhadap keamanan nasional Australia, seperti potensi ketidakstabilan regional, meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional, pembatasan kerja sama militer,

---

<sup>34</sup> *Op. Cit.* hal. 223.

potensi migrasi pengungsi, dan berubahnya dinamika geopolitik serta meningkatnya pengaruh dari Tiongkok.

Gejolak politik di Fiji mampu menimbulkan efek domino bagi negara tetangganya. Hal tersebut dapat membuat lingkungan regional yang tidak stabil, yang dapat mengancam keamanan nasional Australia, yang berkomitmen mendukung stabilitas kawasan tersebut. Pasca kudeta, Australia yang berhenti bekerja sama dalam banyak hal dengan Fiji, khususnya di bidang militer, hal ini mampu mengurangi kemampuan Australia guna mendukung Fiji dalam menjaga keamanan regional, karena Fiji memiliki kemampuan militer yang signifikan di kawasan Pasifik. Tidak hanya itu, krisis dan memburuknya kondisi perekonomian di Fiji dapat memicu gelombang imigrasi atau pengungsi yang mencari perlindungan di negara tetangga, termasuk Australia.

Kudeta di Fiji dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi di kawasan, yang berdampak pada investasi dan perdagangan. Kudeta di Fiji mampu memberikan contoh buruk bagi militer di negara lain yang mungkin mempertimbangkan tindakan serupa jika mereka tidak puas dengan pemerintah sipil. Tindakan militer di Fiji dapat mempengaruhi persepsi dan kebijakan internasional terkait hak asasi manusia dan pemerintahan militer.

Kudeta militer di Fiji tahun 2006 ini berdampak besar pada hubungan Australia dengan Fiji. Australia, yang memainkan peran sebagai *Great Power* di kawasan Pasifik Selatan, mengambil sikap tegas terhadap kudeta tersebut. Akibatnya, hubungan bilateral antara kedua negara menghadapi ketegangan yang cukup serius. Pasca kudeta, Australia lantas mengutuk tindakan militer tersebut

serta menuntut pemulihan segera pada pemerintahan yang demokratis di Fiji. Untuk memberikan tekanan, Australia memberlakukan embargo ekonomi dan larangan berpergian terhadap panglima militer Fiji dan beberapa pemimpin lainnya. Selain itu, Australia juga menghentikan dukungan militer dan bantuan pertahanan ke Fiji. Hal tersebut menunjukkan komitmen Australia dalam mendukung nilai-nilai demokrasi dan kestabilan politik di kawasan.

Hubungan diplomatik antara kedua negara menjadi tegang. Diskusi politik, yang biasanya hangat berubah dengan dipenuhi ketidakpercayaan serta perselisihan. Kedutaan besar dan konsulat kedua negara harus beroperasi dalam kondisi yang buruk, dengan sering terjadinya insiden politik dan komentar negatif di media. Namun, Australia tetap memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada warga Fiji. Hal ini memperlihatkan bahwasannya meskipun terjadi konflik politik, Australia tetap berkomitmen mendukung kepentingan rakyat Fiji. Pada periode ini, peran Australia dalam forum regional juga menjadi penting. Melalui *Pacific Island Forum* (PIF), Australia berupaya mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di Pasifik untuk mengisolasi Fiji hingga kembali ke pemerintahan yang demokratis. Isolasi tersebut berdampak pada posisi Fiji dalam politik regional serta menekan pengaruhnya di kawasan. Secara keseluruhan, kudeta militer tahun 2006 di Fiji mempunyai dampak yang rumit terhadap hubungan Australia dengan Fiji. Ketegangan diplomatik dan sanksi ekonomi menciptakan jarak antara kedua negara, tetapi upaya bantuan dan pembangunan yang berkelanjutan menunjukkan Australia tetap mendukung masyarakat Fiji di tengah krisis politik yang melandanya.

Australia dan Selandia Baru menjadi dua negara yang paling vocal dalam menentang kudeta militer Fiji di tahun 2006. Kedua negara tidak hanya menyuarakan penentangan mereka melalui pernyataan publik tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk menekan pemerintahan militer Fiji. Langkah-langkah tersebut termasuk penganan sanksi ekonomi yang melibatkan pembatasan bantuan ekonomi serta pemberlakuan sanksi individu terhadap mereka yang terlibat dalam kudeta. Selain itu, Australia dan Selandia Baru juga mengurangi tingkat hubungan diplomatik dengan Fiji dan menutup akses negara tersebut ke berbagai pertemuan internasional, sebagai bentuk isolasi diplomatik.

Sementara itu, reaksi dari negara-negara Pasifik lainnya terhadap kudeta yang terjadi di Fiji menunjukkan variasi yang mencerminkan kompleksitas politik regional. Papua Nugini, misalnya menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi di Fiji. Tetapi, negara ini lebih memilih pendekatan diplomatik yang bertujuan guna menyelesaikan krisis melalui dialog dan negosiasi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keinginan Papua Nugini dalam melindungi stabilitas regional tanpa menambah ketegangan. Di sisi lain, Tonga pada awalnya mengadopsi sikap yang lebih lunak dan diplomatis, dengan mendukung proses dialog serta mencari solusi yang damai, yang menunjukkan kehati-hatian dalam mengelola hubungan antarnegara di kawasan Pasifik. Sedangkan Solomon dan Vanuatu menanggapi kudeta dengan keprihatinan yang sama, namun dengan respons yang lebih moderat, yang cenderung mendukung upaya guna resolusi krisis di Fiji yang memperlihatkan pendekatan pragmatis mereka dalam menghadapi dinamika politik regional.

## **2.3 Perubahan Sikap Australia dan Fiji Dalam Bidang Keamanan Pasca**

### **Kudeta Militer**

Australia dan Fiji adalah negara yang sama-sama berkomitmen pada sektor keamanan, khususnya pada hal kestabilan internasional. Australia, sebagai negara besar dengan usaha yang kian intens untuk menegaskan pengaruhnya dengan multilateralisme pada kawasan Asia-Pasifik, sering bekerja sama dengan Amerika Serikat. Posisi ini menempatkan Australia pada persimpangan penting, terutama karena ultimatum keamanan yang kian meningkat dan peristiwa kebangkitan Tiongkok yang membentuk strategi pertahanan Australia kian condong pada arah Washington. Fiji, walaupun mempunyai posisi serta kapasitas yang berbeda, mempunyai impresi keamanan regional yang mirip, dengan fokus dalam segi pertahanan. Kerja sama antara Australia dan Fiji semakin erat, terutama sejak zaman demokratisasi Fiji pada tahun 2014.

Relasi kedua negara ini tak terus harmonis. Sejak kudeta di tahun 2006, Fiji mengalami isolasi di wilayah Pasifik. Akibatnya, Fiji mulai menjalin hubungan ekstra-regional, dengan fokus dalam pengembangan kapasitas perekonomian serta memperkenalkan hubungan sub-regional.

Kedekatan relasi Australia serta Fiji mulai berubah sejak Pemerintah Australia merespons kudeta di Fiji tahun 2006. Australia mempunyai kebutuhan penting guna melahirkan kestabilan di kawasan Pasifik. Tindakan yang diambil oleh Australia meliputi campur tangan militer langsung guna merenovasi pemerintah terseleksi, penerapan sanksi ekonomi, penolakan perdagangan serta agenda olahraga internasional, serta pembekuan aset dari Suva dan embargo

kegiatan bisnis serta pariwisata. Lebih dahulu, Australia juga mencoba pendekatan persuasif guna merayu pemerintah Fiji melaksanakan pemilihan ulang, tetapi upaya diplomatik ini tidak berhasil mempengaruhi pemerintah Fiji.<sup>35</sup>

Tindakan koersif yang diambil oleh Australia menyebabkan penurunan pamor negara tersebut di Pasifik Selatan serta di tingkat internasional, terutama saat Australia sedang berusaha sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).<sup>36</sup> Pengasingan Fiji juga mengganggu relasi regional Australia bersama Papua Nugini, Kepulauan Solomon serta Vanuatu.<sup>37</sup> Kekosongan kerja sama ini memberi peluang bagi Tiongkok guna masuk serta menjalin hubungan bersama negara-negara kepulauan tersebut. Memandang krusialnya kawasan Pasifik bagi Australia, sebagai kepentingan nasional Australia guna memperbaiki relasi bilateral bersama Fiji serta berperan aktif untuk melindungi keamanan di wilayah tersebut.

Di lain sisi, efek atas kudeta di Fiji sangat dipikul oleh negara itu. Setelah bergantinya rezim dengan paksa, Fiji menghadapi kemunduran ekonomi yang memicu instabilitas. Akibat langsung oleh kudeta militer tersebut, kerja sama pertahanan serta bantuan dari Australia, Selandia Baru, Prancis, serta Amerika Serikat dihentikan. Lenyapnya dukungan dari mitra utama ini merenggangkan kekuatan Fiji dalam mengatasi kejahatan lintas negara serta menjaga keamanan perbatasannya. Disaat berupaya kembali menghadapi demokrasi, Fiji cemas akan terjadinya ultimatum eksternal yang mampu merusak keamanan wilayahnya.

---

<sup>35</sup> Hayward-Jones, J, 2011, *Policy Overboard: Australia's Increasingly Costly Fiji Drift*. Sydney: The Lowry Institute.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Herr, R., 2010, *Time for a Fresh Approach, Australia and Fiji Relations Post-Abrogation*. Canberra: ASPI.

Selain itu, Fiji diasingkan dari forum regional semacam Forum Kepulauan Pasifik (PIF). Untuk melindungi keamanan wilayah menjadi kepentingan nasionalnya, Fiji berupaya membuka diri kembali dalam dunia internasional guna memulihkan pemulihan negara setelah kudeta militer.<sup>38</sup>

Australia dan Fiji kemudian mempunyai tujuan serupa guna menjaga kepentingan nasional masing-masing serta melindungi keamanan dan kestabilan wilayah. Kerja sama pada sektor keamanan antara dua negara mampu dijelaskan oleh sebagian faktor. Pertama, Fiji meskipun kecil pada skala regional, memiliki basis militer yang kuat. RFMF adalah garda terdepan negara yang berkontribusi dalam misi penjagaan perdamaian internasional. Kedua, Australia mempunyai profesionalisme pada keamanan, khususnya pada operasi penjagaan perdamaian bersama PBB.<sup>39</sup> Kerja sama tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Fiji menerima bantuan dari Australia seperti peralatan militer serta dukungan untuk melindungi keamanan wilayah dari ultimatum eksternal, sedangkan Australia memperoleh keuntungan dari kontribusi pasukan Fiji pada misi perdamaian global dan melindungi pengaruhnya di Pasifik. Bantuan yang diberikan Australia memperlihatkan kekompakan antar negara Pasifik dan membantu memulihkan keyakinan negara-negara lain terhadap Australia.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Tatre, S., 2010, *"Fiji Islands Security Challenges And Defense Policy Issues"*, dalam S. Tatre (ed.), *Asia Pacific Countries Security Outlook and Its Implications for the Defense Sector*, Tokyo: The National Institute for Defense Studies, pp. 67-84.

<sup>39</sup> Bellamy, P. A., 2012. *"Peacekeeping Contributor Profile: Australia"*. Diakses dalam <https://www.providingforpeacekeeping.org/2014/04/03/contribtor-profile-australia> (18/3/2024, 12:27 WIB)

<sup>40</sup> Tatre, *Loc. Cit.*, hal 10

## 2.4 Signifikansi Strategis Fiji bagi Australia dalam Kudeta Militer 2006

Australia kerap dianggap sebagai kekuatan besar di kawasan Pasifik Selatan. Sedangkan Fiji, dipandang sebagai pusat Pasifik. Fiji adalah pusat perdagangan, transportasi dan layanan pendidikan bagi negara-negara tetangganya. Fiji mempunyai bandara dan pelabuhan yang berfungsi sebagai penghubung di kawasan. Pelabuhan Fiji sendiri ialah simpangan krusial bagi jasa pelayaran antara Amerika Utara, Asia, Australia, Selandia Baru, serta negara kepulauan. Fiji memiliki posisi strategis di Pasifik Selatan. Stabilitas di Fiji penting untuk keamanan maritim dan jalur perdagangan yang melewati wilayah ini. Terdapat dua kota paling besar di Fiji yaitu Suva serta Lautoka, mempunyai pelabuhan bagi kawasan kepulauan Pasifik. Bahwasannya, Fiji berguna strategis bagi Australia baik di sektor keamanan dan ekonomi.<sup>41</sup>

Mempertahankan pengaruh di Kepulauan Melanesia, yang mana Fiji adalah salah satu negara terbesarnya, ialah strategi penting bagi Australia, tetapi Tiongkok yang mulai mengisi kekosongan kekuasaan yang ada ketika Australia menghentikan sebagian besar hubungan dengan Fiji. Permasalahan Fiji bukan hanya mengundang perpecahan yang luas, namun memungkinkan Tiongkok untuk melakukan intervensi serta mengeksploitasi pulau-pulau tersebut, yang bertentangan dengan kepentingan strategis Australia. Australia menganggap kestabilan di kawasan Pasifik Selatan menjadi hal penting untuk keamanan nasionalnya. Pengambilalihan Fiji telah menimbulkan kekacauan yang mampu memengaruhi seluruh wilayah. Melalui tindakan yang tegas pada kudeta tersebut,

---

<sup>41</sup> *Op. Cit.* hal. 5.

Australia menginginkan dapat mencegah insiden yang serupa terjadi di negara-negara Pasifik lainnya. Fiji sendiri ialah pusat bisnis yang krusial di kawasan Pasifik, serta ketidakstabilannya disana dapat berpengaruh negatif terhadap perekonomian kawasan. Australia ingin mempertahankan pengaruhnya di Pasifik Selatan serta memblokir pengaruh negara lain yang bisa saja mempunyai kepentingan yang berbeda, seperti Tiongkok. Dengan adanya kekuatan eksternal seperti Tiongkok yang semakin aktif di kawasan Pasifik, Australia ingin memastikan pengaruhnya tetap kuat. Dengan intervensi di Fiji, Australia mampu menunjukkan komitmennya terhadap kawasan tersebut dan menghalangi pengaruh negara lain yang mungkin bertentangan dengan kepentingannya.

Australia adalah negara donor dengan sokongan paling besar di negara-negara wilayah Pasifik Selatan, terkhusus Fiji. Salah satunya bidang yang sebagai titik pusat Australia yakni bantuan di sektor pertahanan. Sementara, kerja sama di sektor keamanan, Australia serta Fiji pun adalah mitra pada perdagangan. Fiji adalah mitra dagang penting bagi Australia. Ketidakstabilan di Fiji bisa mengganggu hubungan ekonomi dan investasi Australia di negara tersebut. Fiji memiliki kepentingan strategis yang besar bagi Australia, khususnya dalam kaitannya dengan kudeta militer tahun 2006. Stabilitas Fiji sangat krusial bagi keamanan regional, keamanan maritim, kerjasama militer, pengaruh geopolitik, hubungan ekonomi, dan juga isu-isu mengenai kesejahteraan manusia serta imigrasi. Meskipun demokrasi dan hak asasi manusia sering menjadi alasan utama yang diungkapkan secara publik, ada juga upaya untuk memastikan bahwa pemerintahan di Fiji menghormati hak-hak tersebut, yang sejalan dengan nilai-

nilai yang dipegang oleh Australia dan komunitas internasional. Oleh karena itu, Australia prihatin terhadap situasi politik di Fiji dan dampaknya terhadap kepentingannya.

## **2.5 Pergolakan Hubungan Fiji dan Australia**

Bainimarama menjadi pemimpin satu-satunya Fiji dan lantas membangun kabinet sementara dengan 13 anggota, mengusung Ratu Josefa Iloilo menjadi presiden serta Jona Senilagakali menjadi perdana menteri 5 Desember 2006. Jon Senilagakali adalah Perdana Menteri mulai 5 Desember 2006 hingga 4 Januari 2007, sebagai Presiden Fiji lantas dengan resmi mengangkat Perdana Menteri Bainimarama pada 5 Januari 2007.<sup>42</sup>

Sedangkan, Australia mengutuk perebutan kewenangan atas militer. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengatakan kepada parlemen di Canberra bahwa tindakan militer mampu berpengaruh negatif dalam ekonomi Fiji.<sup>43</sup> Australia adalah negara yang berupaya memulihkan demokrasi Fiji. Pemerintah Australia mengambil langkah ini sebagai tanggapan atas kudeta militer yang menggulingkan pemerintah sipil pada tahun 2006 di bawah komando Frank Bainimarama. Dilakukannya hal tersebut oleh pemerintah Australia yakni guna meninggalkan efek negatif yang dapat berdampak kepada negara di kawasan Pasifik Selatan.

Pada segi ekonomi Australia memberikan sokongan kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, Kawasan Pasifik Selatan telah menarik lebih banyak

---

<sup>42</sup> *Op. Cit. Fiji Development Cooperation Report 2010*

<sup>43</sup> *Ibid.*

minat bagi para pemain kekuatan utama. Pada awalnya, Australia adalah satu-satunya aktor yang dikenal di Pasifik Selatan, Australia menganggap dirinya sebagai kekuatan regional dan pemimpin kawasan, Kepemimpinan Australia memungkinkannya untuk memberikan bantuan militer dan bantuan ekonomi kepada kawasan, dengan kepemimpinannya yang memungkinkan Australia menjadi negara paling berpengaruh di kawasan ini,<sup>44</sup> terutama Fiji, dan juga Australia telah memberi bantuan pertahanan kepada Fiji. Melalui sokongan ini, Australia berharap dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan. Fiji merupakan negara penerima bantuan atas Australia, serta sokongan yang didapat Fiji dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bahwasannya bantuan keamanan yang diberikan Australia kepada Fiji setiap tahunnya menghadapi kenaikan. Sehingga dapat dianalisa bahwa peningkatan setiap tahunnya jumlah bantuan memperlihatkan sebuah keseriusan kerja sama yang melonjak antara Fiji dengan Australia.

Australia-Fiji memiliki sebuah relasi yakni partner dagang, dua negara tersebut bekerja sama pada ekspor impor dengan 1,4 Miliar setiap tahunnya. Australia pada tahun 2006 merupakan salah satu tujuan dalam ekspor yang terbesar serta sebagai sumber impor terbanyak kedua bagi Fiji. Pada tahun 2006 perdagangan barang antara dua negara mencapai 531 juta dolar (ekspor Fiji ke Australia sebanyak 148 juta dolar, sedangkan ekspor Australia ke Fiji sebanyak 383 juta dolar) dari seluruh total ekspor Fiji ke Australia mencapai 13,8%, dan 23,3% impor Fiji dari Australia. Tidak hanya itu, bagi Fiji, Australia dipandang

---

<sup>44</sup> Zahidi, M. S, 2018, *The Melanesian Spearhead Group in terms of Indonesia's interest*. Przegląd Politologiczny, 165-172, Diakses dari [The Melanesian Spearhead Group in terms of Indonesia's interest - UMM Institutional Repository](#) (5/10/2023, 23:56 WIB)

sebagai negara berjasa dalam pembangunan ekonomi di Fiji. Dimana menjadi investor asing di Fiji terbesar.<sup>45</sup>

Australia turut membantu keamanan dengan adanya kudeta Fiji yang mana mengakibatkan kerusuhan, kegaduhan serta kestabilan keamanan yang sebagai ultimatum regional. Dalam bercampur tangan atas kedaulatan di Fiji, Kebijakan Australia terlihat menonjol. Akan tetapi yang terjadi tidak seperti itu melainkan kerusuhan dan konflik yang terjadi tersebut membuat pemerintah Fiji kewalahan dalam mengatasi sehingga meminta bantuan Australia serta pasukan untuk menangani kerusuhan dan konflik yang terjadi tersebut.<sup>46</sup>

Terdapatnya upaya dari Australia yang meletakkan angkatannya di Fiji, sebuah aksi yang tak bisa disalahkan ataupun melanggar hukum kedaulatan internasional. Adanya stabilitas keamanan bersama di kawasan yang diinginkan oleh Australia, sehingga dengan adanya stabilitas keamanan tersebut maka Australia dapat memberikan respon dengan cara memperlaju prosedur modifikasi situasi di Fiji agar tak mengakibatkan sebuah efek negatif untuk kestabilan wilayah di Fiji.

Tidak hanya relasi kerjasama ekonomi terdapatnya hubungan dalam *people to people link* dan juga pariwisata.<sup>47</sup> Maka mampu disebut bahwa peralihan masyarakat di wilayah ada juga relasi tidak hanya dalam elemen kerjasama antar pemerintahan melainkan dengan hubungan sosial didalamnya. Adanya suatu relasi *People to People* menjadikan alasan Australia, mengapa kudeta Militer tahun

---

<sup>45</sup> *Fiji Country Brief*, diakses dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html> (12/1/2024, 15:57 WIB)

<sup>46</sup> *Loc. Cit.* Kudeta Militer Fiji

<sup>47</sup> *Aust Govt Rejects Fijian Request for Military Intervention*, diakses dalam <http://www.abc.net.au/lateline/content/2006/s1804980.htm> (25/9/2023, 11:27 WIB)

2006 Fiji yang menjadi sebuah ancaman tidak hanya menjadi suatu permasalahan domestik saja terhadap negara di kawasan.

